



Mengurai Benang Kusut Kebijakan Pendidikan Indonesia: Sebuah Literature Review Analitik

Jaka Wijaya Kusuma^{1*}, Hamidah¹, Umalihayati², Puput Puspito Rini³

¹ Pendidikan Matematika, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

² Pendidikan Guru dan Sekolah Dasar, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia

³ Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Bestari, Serang, Indonesia

Corresponding author email: jakawijayak@gmail.com

Article Info

Article history:

Received May 16, 2024

Approved June 18, 2024

Keywords:

*Education Policy,
Literature Review,
Education Reform,
Education Accessibility,
Education Equality*

ABSTRACT

This article presents a comprehensive analysis of various education policies that have been implemented in various regions in Indonesia. Through the literature review method, this study identifies reviews and evaluates various studies that have been published on the impact and effectiveness of education policies. The main focus of this review is to understand how such policies contribute to improving education quality, educational accessibility, and educational equity across various socio-economic contexts. The analysis was conducted on literature covering a wide range of educational reforms, from implementing new curricula and using technology in education to inclusive education policies and policies promoting gender and social equality. This article combines findings from various studies to present a broad picture of challenges, successes, and failures in education policy implementation. These findings are expected to provide valuable insights for policymakers, educators, and researchers in designing future more effective and inclusive education strategies.

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan analisis komprehensif tentang berbagai kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui metode literature review, penelitian ini mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi berbagai studi yang telah dipublikasikan mengenai dampak dan efektivitas kebijakan pendidikan. Fokus utama dari review ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas pendidikan, dan kesetaraan pendidikan di berbagai konteks sosial-ekonomi. Analisis dilakukan terhadap literatur yang mencakup berbagai reformasi pendidikan, dari penerapan kurikulum baru, penggunaan teknologi dalam pendidikan, hingga kebijakan pendidikan inklusif dan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan gender dan sosial. Artikel ini menggabungkan temuan dari berbagai studi untuk menyajikan gambaran yang luas tentang tantangan, keberhasilan, dan kegagalan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan peneliti dalam merancang strategi pendidikan yang lebih efektif dan inklusif di masa depan.



How to cite: Kusuma, J. W., Hamidah, H., Umalihayati, U., & Rini, P. P. (2024). Mengurai Benang Kusut Kebijakan Pendidikan Indonesia: Sebuah Literature Review Analitik. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 1810–1826. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2772>

PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian sepanjang tahun, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di seluruh negeri. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks yang membutuhkan kebijakan yang efektif dan adaptif. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya yang luas, Indonesia terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikannya. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pendidikan untuk menangani masalah ini, namun masih terdapat beberapa hambatan yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional (Afandi et al., 2022).

Beberapa Kebijakan Pendidikan Indonesia yang dibahas di Artikel ini yakni: Kebijakan Kurikulum 2013 ini diperkenalkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada kompetensi inti seperti sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum 2013 mendorong penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, di mana siswa diajak untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan untuk memperoleh pengetahuan. Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun, Pemerintah Indonesia telah memperluas program wajib belajar dari semula 9 tahun menjadi 12 tahun, yang mencakup pendidikan dasar dan menengah (Nisak, 2018). Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan di seluruh populasi dan memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan menengah. Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program beasiswa dan bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk memastikan bahwa masalah keuangan tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Kebijakan Satu Sekolah Satu Inovasi yakni Kebijakan ini diinisiasi untuk mendorong sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengembangkan inovasi dalam pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal masing-masing sekolah. Kebijakan Penilaian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebagai bagian dari usaha untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, Ujian Nasional berbasis komputer diperkenalkan untuk menggantikan metode penilaian tradisional dan untuk mengurangi kecurangan selama ujian. Kebijakan Merdeka Belajar diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada guru dan sekolah untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. Ini termasuk perubahan dalam struktur kurikulum dan penilaian untuk mendorong proses belajar yang lebih mendalam dan aplikatif (Prapti, 2021). Kebijakan Sekolah Penggerak yakni Merupakan inisiatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia melalui peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah, serta pengoptimalan kurikulum dan pengelolaan sekolah berbasis data. Dari uraian kebijakan yang disampaikan, Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menyikapi tantangan yang ada dan terus memajukan sektor pendidikan di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan, seperti kualitas pendidikan yang beragam di berbagai daerah dan kesiapan infrastruktur,

langkah-langkah ini diharapkan bisa membawa perubahan positif dalam jangka panjang (Agus Salim, 2022).

Meskipun ada peningkatan signifikan dalam akses pendidikan melalui program wajib belajar 12 tahun, masalah kualitas pendidikan masih menjadi isu utama. Kurangnya sumber daya, fasilitas yang tidak memadai, dan distribusi guru yang tidak merata di beberapa daerah menyebabkan disparitas dalam kualitas pendidikan antar daerah (Zakaria, 2022). Kemudian implementasi kurikulum yang sering berubah menimbulkan tantangan dalam penerapannya di lapangan. Kurikulum 2013, misalnya, telah mendapat berbagai tanggapan dan membutuhkan adaptasi yang luas dari para pendidik untuk efektif. Kebijakan pendidikan yang tidak konsisten dari waktu ke waktu menambah kerumitan dalam praktik pendidikan, yang mempengaruhi baik guru maupun siswa. Selanjutnya tantangan teknologi dalam pendidikan juga menjadi sorotan, terutama dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses belajar mengajar (Aulia, 2023). Meski banyak inisiatif pemerintah, seperti penggunaan platform pembelajaran online, namun kesiapan infrastruktur dan literasi digital di beberapa daerah masih menjadi kendala. Kebijakan pendidikan yang dijalankan perlu lebih inklusif untuk menjangkau kelompok marginal dan daerah terpencil. Inisiatif seperti Program Indonesia Pintar memang telah dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan, namun efektivitasnya perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Saputri, 2021). Dalam menghadapi tantangan ini, perlu dilakukan analisis mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan untuk memahami apa yang telah berhasil dan apa yang belum, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. "Mengurai Benang Kusut Kebijakan Pendidikan Indonesia: Sebuah Literature Review Analitik" bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai studi dan literatur yang ada mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia, memberikan wawasan analitis untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan di Indonesia. Sehingga tema besar ini lah yang penulis angkat dalam tulisan ini.

METODE

Metode Penelitian ini akan menguraikan temuan dari review literatur yang telah dilakukan. Membahas tentang perubahan kebijakan pendidikan yang signifikan, termasuk tujuan dan hasil dari reformasi yang telah diimplementasikan. Diskusi ini akan mencakup analisis mendalam mengenai kebijakan yang berhasil dan yang tidak, serta faktor-faktor yang berkontribusi pada kedua hasil tersebut. Artikel ini akan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Indonesia (Darma & Wulandari, 2022). Data akan dikumpulkan dari jurnal akademik, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi lainnya. Kriteria inklusi akan berfokus pada dokumen yang memberikan insight mengenai pembuatan kebijakan, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam literatur menggunakan coding untuk mengekstrak data penting dan memetakan evolusi kebijakan serta dampaknya. Analisis tematik akan membantu dalam menginterpretasi data dan menyajikan temuan dalam narasi yang koheren. Menganalisis temuan dari literatur dengan mendalam, menghubungkan antara teori dan praktik dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Analisis akan fokus pada mengidentifikasi masalah utama yang menghambat keberhasilan kebijakan, serta potensi solusi untuk mengatasi masalah tersebut (Yunitasari et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kurikulum 2013

Kebijakan Kurikulum 2013 di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam reformasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Kurikulum 2013 dirancang untuk mengatasi berbagai kelemahan dalam kurikulum sebelumnya dan untuk memastikan bahwa siswa Indonesia memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bersaing di era global. Berikut adalah definisi narasi kebijakan Kurikulum 2013, yang mencakup konteks pembentukan, tujuan, dan implementasinya. Kurikulum 2013 dibuat sebagai respons terhadap perubahan kebutuhan dunia pendidikan dan industri serta tantangan global. Kurikulum ini diharapkan dapat memperbaiki ketidaksesuaian antara output pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja yang semakin kompleks. Pemerintah Indonesia melihat perlunya pendekatan baru yang lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa, seperti kritis berpikir, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif (Utari, 2020).

Tujuan utama dari Kurikulum 2013 adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan sekolah di Indonesia dengan fokus pada:

1. Penguatan karakter: Mengutamakan pendidikan karakter untuk membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki integritas moral dan etika yang kuat,
2. Pengembangan kompetensi: Meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif,
3. Kesiapan karir: Memastikan bahwa siswa memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini.

Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan secara bertahap dan melibatkan pelatihan guru, perubahan materi pembelajaran, serta penyesuaian metode pengajaran. Kurikulum ini memperkenalkan konsep pembelajaran tematik integratif di sekolah dasar dan pendekatan saintifik di semua tingkatan, yang meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan (Suryanti, 2022).

1. Pelatihan Guru: Guru-guru diberikan pelatihan untuk memahami dan mengimplementasikan metode pengajaran yang baru,
2. Pembelajaran Berbasis Proyek: Siswa diberikan kebebasan lebih dalam mengeksplorasi materi pembelajaran melalui proyek-proyek yang mendukung pengembangan kompetensi yang diinginkan,
3. Penilaian Autentik: Penilaian siswa tidak hanya berfokus pada hasil ujian tertulis tetapi juga penilaian berbasis kinerja, seperti portofolio, presentasi, dan proyek.

Kurikulum 2013 terus dievaluasi untuk menilai efektivitasnya dan dilakukan ajustemen jika diperlukan. Hal ini melibatkan feedback dari semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan ahli pendidikan. Penyesuaian ini bertujuan untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan dengan kondisi serta tantangan terkini. Kebijakan Kurikulum 2013 adalah langkah maju dalam upaya meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih modern dan komprehensif, diharapkan dapat membentuk lulusan yang tidak hanya berkompeten di bidang akademik tetapi juga mampu berkontribusi secara efektif dalam masyarakat dan dunia kerja (Yunitasari et al., 2023).

Pengenalan Kurikulum 2013 di Indonesia telah mengundang banyak harapan untuk revitalisasi sistem pendidikan, namun di balik harapan tersebut terdapat sejumlah permasalahan

dan hambatan yang nyata. Cerita ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tantangan yang dihadapi oleh para guru hingga keraguan dari orang tua dan siswa. Berikut adalah narasi yang mendalam tentang tantangan implementasi Kurikulum 2013 (Utari, 2020).

Sejak awal, salah satu masalah utama yang menjadi hambatan adalah kurangnya persiapan dan pelatihan yang memadai untuk guru. Di sebuah sekolah dasar di pinggiran Jakarta, Ibu Anita, seorang guru kelas lima, mencerminkan kekhawatiran banyak rekan kerjanya. Meskipun antusias dengan potensi perubahan, dia merasa bahwa pelatihan yang diterimanya tidak cukup memadai untuk mengubah metode pengajarannya secara radikal. *"Kami hanya mendapat beberapa hari pelatihan tanpa dukungan berkelanjutan,"* keluhnya.

Di sisi lain Indonesia, di sebuah desa terpencil di Sulawesi, sekolah-sekolah berjuang dengan keterbatasan sumber daya yang lebih serius. Pak Budi, kepala sekolah, menghadapi kesulitan untuk mengimplementasikan kurikulum yang mengandalkan teknologi dan sumber belajar modern. *"Kami berusaha mengikuti kurikulum baru, tetapi bagaimana mungkin tanpa komputer yang cukup atau bahkan akses internet yang layak?"* ujarnya dengan frustrasi (Suryanti, 2022).

Kembali ke Jawa, di sekolah menengah pertama di Bandung, tantangan adaptasi kurikulum menjadi sangat nyata. Guru-guru seperti Bu Sari merasa bahwa kurikulum baru membutuhkan persiapan yang lebih intensif dan menambah beban kerja mereka. *"Perencanaan untuk proyek siswa dan penilaian berbasis kinerja membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit,"* jelasnya.

Perubahan dalam metode pengajaran tidak hanya mempengaruhi guru dan administrasi sekolah tetapi juga siswa dan orang tua mereka. Di beberapa kasus, siswa merasa kewalahan dengan metode pembelajaran yang mandiri dan proyek yang harus mereka tangani. Orang tua, di sisi lain, kadang-kadang skeptis dan bingung dengan perubahan mendadak dalam penilaian dan pendekatan belajar yang lebih aktif, yang jauh berbeda dari sistem yang mereka kenal.

Melalui cerita-cerita dari berbagai sudut Indonesia, gambaran yang muncul adalah bahwa sementara Kurikulum 2013 memiliki potensi untuk membawa perubahan positif, ada hambatan nyata yang perlu diatasi. Diperlukan upaya yang lebih besar untuk memastikan bahwa pelatihan dan sumber daya mencukupi tersedia, serta memerlukan komunikasi yang lebih baik antara sekolah dan komunitas. Masa depan pendidikan di Indonesia bergantung pada kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah ini secara efektif dan memastikan bahwa setiap sekolah, guru, dan siswa dapat beradaptasi dan berkembang di bawah Kurikulum 2013.

Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Di tengah upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, pemerintah mengimplementasikan kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Kebijakan ini bukan hanya sebuah peraturan, melainkan visi untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi generasi mendatang. Program ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia menerima pendidikan minimal selama dua belas tahun, yang meliputi pendidikan dasar dan menengah (P. Lamadang et al., 2022).

Kebijakan ini bermula dari pengamatan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam pembangunan karakter dan kemampuan intelektual individu, serta dalam memajukan perekonomian negara. Sebelumnya, wajib belajar di Indonesia terbatas hanya sampai tingkat pendidikan dasar, atau sembilan tahun. Namun, percepatan perubahan sosial dan ekonomi global menuntut peningkatan kualifikasi dan keahlian, mendorong kebutuhan untuk perpanjangan masa wajib belajar (Idris, 2020).

Program Wajib Belajar 12 Tahun dirancang dengan beberapa tujuan utama:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Memperluas wawasan dan kemampuan anak didik sehingga mereka lebih kompetitif di pasar global,
2. Pengurangan Ketimpangan Pendidikan: Memastikan setiap anak, terlepas dari latar belakang ekonomi dan sosial, memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas,
3. Pemberdayaan Pemuda: Melalui pendidikan yang lebih lengkap, pemuda diharapkan dapat lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah tidak hanya mengharuskan pendidikan gratis sampai tingkat menengah, tetapi juga mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan program bantuan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini juga menyertakan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman (Sumpena et al., 2022).

Meskipun program ini menjanjikan banyak perubahan positif, implementasinya tidak terlepas dari tantangan. Masalah seperti distribusi sumber daya yang tidak merata, perbedaan kualitas pendidikan antar daerah, dan kebutuhan untuk peningkatan kualifikasi guru terus dihadapi dan ditangani secara bertahap.

Dengan kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun, Indonesia berharap untuk melahirkan generasi yang tidak hanya cakap secara akademik tetapi juga siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Melalui pendidikan yang lebih inklusif dan komprehensif, program ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang produktif, inovatif, dan bertanggung jawab (Ariandy, 2019).

Ketika Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan Program Wajib Belajar 12 Tahun, visinya adalah menciptakan akses pendidikan yang lebih luas dan lebih mendalam bagi semua anak di negara ini. Namun, dalam proses pelaksanaannya, terdapat serangkaian tantangan yang menunjukkan kompleksitas dan dinamika yang dihadapi oleh kebijakan seambisius ini. Di daerah terpencil seperti di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur, masalah infrastruktur menjadi hambatan yang serius (Anis Aprianti & Siti Tiara Maulia, 2023). Sekolah-sekolah di sana mengalami kesulitan untuk memenuhi standar yang diharuskan oleh program wajib belajar karena keterbatasan fasilitas. "Kami hanya memiliki beberapa ruang kelas yang masih perlu renovasi besar-besaran," ujar Pak Wayan, seorang kepala sekolah. Program Wajib Belajar 12 Tahun juga dihadapkan pada kekurangan guru yang berkualitas, terutama di mata pelajaran kunci seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Di sebuah kota di Jawa Timur, Bu Lestari, seorang guru matematika, mencerminkan kekhawatiran banyak guru lainnya (Hamidah, 2020). "*Kami membutuhkan lebih banyak pelatihan dan sumber daya untuk benar-benar membantu siswa mencapai potensi mereka,*" ungkapnya. Meskipun pemerintah telah menyatakan pendidikan gratis hingga tingkat menengah atas, realitas di lapangan seringkali berbeda. Di banyak daerah, orang tua masih harus memikul biaya tidak langsung seperti seragam sekolah, buku, dan transportasi, yang menjadi beban berat bagi keluarga berpenghasilan rendah. "*Bagaimana saya bisa menyekolahkan tiga anak jika setiap tahun saya harus membeli semua perlengkapan ini?*" , keluh Ibu Hartati dari daerah pedesaan di Sumatera. Perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara sekolah negeri dan swasta, menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Anak-anak di kota besar seperti Jakarta memiliki akses ke sumber daya yang lebih baik dan pengajaran yang lebih berkualitas dibandingkan mereka yang di daerah terisolir (Hubarat, 2017).

Melalui pengalaman para guru, kepala sekolah, dan orang tua di berbagai wilayah Indonesia, jelas bahwa Program Wajib Belajar 12 Tahun memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan. Namun, agar visi ini dapat terwujud, diperlukan

penanganan yang efektif atas berbagai hambatan ini. Peningkatan alokasi sumber daya, pelatihan guru, dan dukungan infrastruktur yang lebih adil dan merata adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia dapat memanfaatkan hak mereka atas pendidikan yang berkualitas. Dengan perbaikan ini, harapan untuk pendidikan yang lebih inklusif dan efektif dapat menjadi kenyataan bagi semua.

Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan dan pengurangan kesenjangan pendidikan di seluruh negeri. Program ini diresmikan dengan tujuan utama untuk memberikan bantuan finansial kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan ekonomi (Nurkamiden, 2021). Dilatarbelakangi oleh realitas bahwa banyak keluarga di Indonesia masih berjuang untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, Program Indonesia Pintar menjadi strategi pemerintah untuk mengintervensi secara langsung dalam masalah ini. PIP menjadi solusi bagi ribuan siswa yang risiko putus sekolahnya tinggi karena alasan finansial.

Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah tiga liput:

1. Mengurangi Angka Putus Sekolah: Dengan memberikan bantuan finansial, PIP bertujuan untuk menurunkan jumlah anak yang terpaksa berhenti sekolah karena orang tua mereka tidak mampu menanggung biaya pendidikan,
2. Meningkatkan Akses Pendidikan Berkualitas: Program ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,
3. Peningkatan Partisipasi Siswa dalam Pendidikan: Dengan memberikan keamanan finansial, PIP berupaya untuk meningkatkan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Implementasi Program Indonesia Pintar dilakukan melalui distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang memungkinkan siswa untuk membeli seragam sekolah, buku pelajaran, dan perlengkapan sekolah lainnya (Masitoh & Kurnia, 2022). Penerimaan KIP diatur melalui sistem yang memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan Program Indonesia Pintar, harapan yang diusung adalah pembentukan generasi masa depan yang lebih terdidik dan terampil. Anak-anak yang dulunya mungkin terpaksa meninggalkan bangku sekolah sekarang memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan akhirnya memberi kontribusi pada masyarakat dan ekonomi Indonesia. Melalui narasi ini, jelaslah bahwa Kebijakan Program Indonesia Pintar adalah langkah strategis pemerintah dalam memerangi ketidaksetaraan pendidikan dan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu siswa saat ini tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi kemajuan sosial dan ekonomi negara di masa depan (Sukmurdianto & Zulfa, 2020).

Meskipun Program Indonesia Pintar (PIP) dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pelaksanaannya tidak luput dari sejumlah hambatan dan permasalahan. Cerita ini mencerminkan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi program tersebut, yang mencakup guru, orang tua, dan pemangku kebijakan. Di sebuah desa di Kalimantan, Ibu Rina, seorang ibu dari tiga anak sekolah, menghadapi kesulitan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). *"Saya*

sudah mendaftarkan anak saya beberapa bulan yang lalu, tapi sampai sekarang kartunya belum juga datang," keluhnya. Kasus seperti ini bukanlah satu-satunya, banyak keluarga di daerah terpencil mengalami hambatan serupa karena masalah logistik dan birokrasi (RD, 2021). Dari sudut lain, di sebuah kota di Jawa, terdapat laporan tentang penyalahgunaan dana PIP oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Bapak Agus, seorang kepala sekolah, mencatat bahwa ada kasus di mana dana yang seharusnya diperuntukkan bagi siswa malah dialihkan untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan tujuan program. *"Kami perlu sistem yang lebih ketat untuk memastikan dana ini benar-benar sampai ke siswa yang membutuhkan,"* tegasnya. Di sisi informasi, masih banyak orang tua yang tidak menyadari atau tidak mengerti bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan manfaat dari KIP. Bu Lestari, seorang guru di Sulawesi, menemukan bahwa beberapa orang tua siswanya tidak tahu bahwa mereka harus mengaktivasi kartu tersebut atau bagaimana menggunakannya untuk keperluan pendidikan. *"Kami perlu lebih banyak sosialisasi dan edukasi tentang program ini,"* kata Bu Lestari. Meskipun pemerintah telah menetapkan prosedur yang ketat untuk distribusi dan penggunaan KIP, masih ada isu kepatuhan yang sering terjadi. Kekurangan pemantauan efektif terhadap penggunaan dana sering kali membuat bantuan tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Hal ini mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu siswa kurang mampu (Kimbal et al., 2022). Melalui cerita dan pengalaman para stakeholder ini, terlihat bahwa Program Indonesia Pintar memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, agar dapat mencapai potensi tersebut, diperlukan upaya bersama untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada, seperti memperbaiki sistem distribusi, memperkuat mekanisme pemantauan dan audit, serta meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang program ini. Dengan pembenahan ini, Program Indonesia Pintar diharapkan dapat lebih efektif dalam memenuhi misinya untuk memberdayakan generasi muda Indonesia melalui pendidikan.

Kebijakan Satu Sekolah Satu Inovasi

Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, Indonesia menghadapi tantangan untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, pemerintah Indonesia menggagas kebijakan "Satu Sekolah Satu Inovasi". Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong setiap sekolah di Indonesia untuk mengembangkan setidaknya satu program inovatif yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan proses pembelajaran di lingkungan mereka (Munandar, 2019). Kebijakan ini lahir dari kesadaran bahwa pendidikan harus terus berinovasi untuk menjawab kebutuhan zaman dan mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan. Pemerintah menyadari bahwa sekolah-sekolah perlu lebih fleksibel dan kreatif dalam mendidik siswa, tidak hanya mengandalkan metode pengajaran tradisional yang mungkin tidak lagi efektif di era digital ini.

"Satu Sekolah Satu Inovasi" memiliki beberapa tujuan utama:

1. Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi di Sekolah: Menginspirasi guru dan siswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menciptakan solusi untuk masalah pembelajaran yang mereka hadapi,
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan: Melalui inovasi, sekolah dapat menyediakan pendidikan yang lebih menarik dan relevan, yang pada gilirannya meningkatkan hasil belajar siswa,

3. Adaptasi dengan Perubahan Teknologi: Mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar lebih efisien dan menarik.

Implementasi kebijakan ini dilakukan dengan cara mendorong setiap sekolah untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan unik mereka dan kemudian mengembangkan sebuah proyek inovatif yang bisa menjawab masalah tersebut. Pemerintah mendukung inisiatif ini dengan menyediakan sumber daya, pelatihan untuk guru, dan bantuan teknis (Gusli et al., 2021). Sebagai contoh, sebuah sekolah di Bandung mungkin memperkenalkan metode pembelajaran berbasis game untuk meningkatkan keterampilan matematika, sementara sekolah di Bali mungkin mengembangkan program untuk memadukan seni tradisional dengan kurikulum sekolah sebagai cara untuk melestarikan budaya lokal sekaligus mengedukasi siswa. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan setiap sekolah menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan pendidikan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menginspirasi komunitas sekolah untuk terus menggali potensi kreatif dan inovatif mereka, membuat proses belajar mengajar tidak hanya lebih efektif tapi juga lebih menyenangkan dan relevan bagi siswa. Melalui narasi ini, kebijakan "Satu Sekolah Satu Inovasi" digambarkan sebagai inisiatif yang penting dalam menanamkan budaya inovasi dalam pendidikan di Indonesia, memastikan bahwa pendidikan tetap selaras dengan kebutuhan dan tantangan masa kini dan masa depan (Ulum, 2020).

Kebijakan "Satu Sekolah Satu Inovasi" di Indonesia memiliki visi yang besar untuk mengubah lanskap pendidikan dengan mendukung sekolah-sekolah di seluruh negeri untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide inovatif. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini menghadapi beberapa hambatan dan permasalahan yang serius. Kisah-kisah berikut ini mencerminkan tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah-sekolah dalam mewujudkan tujuan ini. Di sebuah sekolah dasar di pedalaman Kalimantan, kepala sekolah Pak Arifin mengungkapkan frustrasinya tentang kurangnya sumber daya. *"Kami ingin mengimplementasikan program inovatif yang telah kami rancang, namun kami terkendala oleh dana yang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai,"* ujarnya. Cerita Pak Arifin bukanlah kasus yang terisolasi; banyak sekolah di daerah terpencil menghadapi masalah serupa, di mana niat baik untuk berinovasi terhambat oleh realitas kekurangan fasilitas dan teknologi (Farkhan et al., 2022). Di sisi lain, di sebuah kota besar seperti Surabaya, meskipun sumber daya lebih banyak, guru-guru di sebuah SMP merasa mereka tidak mendapatkan cukup dukungan atau pelatihan untuk mengembangkan dan menerapkan ide-ide inovatif. Bu Sinta, seorang guru matematika, menambahkan, *"Kami diberitahu untuk berinovasi, tetapi tidak ada panduan yang jelas atau pelatihan tentang cara melakukannya dengan efektif."* Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dan realitas kemampuan serta pengetahuan yang dimiliki oleh para pendidik (Amri et al., 2021). Di beberapa sekolah, terdapat resistensi terhadap perubahan dari dalam komunitas sekolah itu sendiri. Misalnya, di sebuah SMA di Jakarta, beberapa staf senior merasa tidak nyaman dengan perubahan dan lebih memilih untuk bertahan pada metode lama yang mereka anggap sudah terbukti efektivitasnya. *"Perubahan memang perlu, tapi terlalu banyak eksperimen bisa mengganggu,"* kata Pak Budi, seorang guru senior. Sikap ini bisa menghambat inisiatif inovasi yang membutuhkan kolaborasi dan komitmen dari semua pihak di sekolah. Masalah lain yang sering muncul adalah kurangnya mekanisme evaluasi dan monitoring yang efektif untuk mengukur dampak inovasi yang diterapkan. Tanpa umpan balik yang konstruktif dan data performa yang akurat, sulit bagi sekolah untuk mengetahui apakah inovasi yang mereka terapkan benar-benar efektif atau hanya menjadi beban tambahan bagi guru dan siswa.

Melalui cerita dari berbagai sekolah, jelas bahwa meskipun kebijakan "Satu Sekolah Satu Inovasi" memiliki potensi yang signifikan untuk memajukan pendidikan, masih ada banyak hambatan yang harus diatasi. Penanganan isu-isu seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dan pelatihan, resistensi terhadap perubahan, serta kebutuhan akan evaluasi yang lebih baik, merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan sukses di semua sekolah di Indonesia.

Kebijakan Penilaian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Dalam upaya memodernisasi sistem evaluasi pendidikan dan meningkatkan integritas serta objektivitas penilaian, pemerintah Indonesia mengimplementasikan Kebijakan Penilaian Nasional Berbasis Komputer, dikenal juga sebagai UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer). Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam revolusi pendidikan di Indonesia, yang menandai transisi dari metode penilaian tradisional menggunakan kertas dan pensil, ke sistem yang lebih modern dan canggih. Sebelumnya, ujian nasional di Indonesia diadakan dengan metode kertas dan pensil, yang sering kali terkait dengan isu kecurangan, kesalahan distribusi soal, dan tantangan logistik lainnya. Menyikapi tantangan tersebut, UNBK diperkenalkan sebagai solusi yang lebih aman dan efisien, dengan harapan untuk mengurangi kecurangan dan meningkatkan keadilan serta akurasi dalam penilaian.

Kebijakan UNBK memiliki tujuan yang jelas dan beragam (Ishak, 2021):

1. Meningkatkan Integritas dan Objektivitas: Dengan sistem yang terkomputerisasi, UNBK meminimalisir peluang kecurangan yang mungkin terjadi selama ujian, sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dipercaya,
2. Efisiensi dan Keamanan: UNBK memungkinkan distribusi soal ujian yang lebih aman dan efisien, mengeliminasi risiko kebocoran soal yang sering menghantui sistem penilaian tradisional,
3. Kesiapan Menghadapi Era Digital: Implementasi UNBK juga bertujuan untuk menyiapkan siswa menghadapi lingkungan kerja dan akademis yang semakin didigitalisasi, melatih mereka dalam menggunakan teknologi dalam konteks formal dan penting.

Implementasi UNBK tidak hanya melibatkan instalasi perangkat keras dan perangkat lunak di sekolah-sekolah, tetapi juga melatih guru dan siswa untuk mengadaptasi metode baru ini. Pemerintah bekerja sama dengan sekolah dan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa infrastruktur TI cukup memadai dan terjaga, serta para pengajar dan peserta didik terbiasa dengan sistem baru sebelum ujian dilaksanakan. Sejak diperkenalkannya UNBK, ada laporan-laporan positif mengenai penurunan insiden kecurangan dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan ujian nasional. Namun, ini juga membawa tantangan baru, seperti kebutuhan akan infrastruktur TI yang andal dan pelatihan teknis yang lebih luas untuk semua pihak terkait. Kebijakan UNBK adalah langkah maju bagi Indonesia dalam menstandarisasi dan memodernisasi sistem evaluasi pendidikan. Ini merupakan bagian dari visi lebih besar untuk tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan tetapi juga menyiapkan generasi muda Indonesia dalam menghadapi dunia yang semakin digital. Dengan terus menerapkan dan menyempurnakan kebijakan ini, harapan untuk sistem pendidikan yang lebih adil, akurat, dan relevan semakin terbuka lebar (Khoiriyah et al., 2023).

Kebijakan Penilaian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Indonesia merupakan sebuah inisiatif yang revolusioner dalam sistem pendidikan nasional. Namun, seperti banyak kebijakan baru yang ambisius, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Banyak sekolah di

seluruh negeri menghadapi serangkaian hambatan yang mengkomplikasi transisi ini dari kertas ke digital. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur. Di sebuah sekolah menengah di pedalaman Sumatera, kepala sekolah, Pak Joko, mengungkapkan kekhawatirannya. *"Kami ingin melaksanakan UNBK, tetapi kami sering mengalami pemadaman listrik dan koneksi internet yang tidak stabil,"* jelasnya. Keadaan serupa terjadi di banyak daerah lain yang infrastrukturnya belum memadai untuk mendukung teknologi yang diperlukan untuk UNBK. Meskipun infrastruktur mungkin ada, kesiapan pengguna seringkali kurang. Di sebuah kota besar seperti Surabaya, seorang guru komputer, Bu Anita, mencatat bahwa tidak semua guru dan siswa merasa nyaman menggunakan teknologi untuk ujian. *"Kami memerlukan lebih banyak pelatihan dan waktu untuk beradaptasi dengan sistem baru ini,"* katanya. Guru dan siswa perlu dilatih tidak hanya dalam hal teknis penggunaan komputer tetapi juga dalam mengatasi kecemasan yang mungkin muncul dari perubahan besar dalam cara ujian dilaksanakan. Pengalaman teknis selama ujian juga menyimpan potensi masalah. Di Jawa Barat, selama salah satu sesi UNBK, sistem tiba-tiba mengalami crash, menyebabkan kepanikan dan kebingungan di kalangan siswa dan pengawas (Kholifah et al., 2024). Insiden seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang keandalan software dan hardware yang digunakan, serta kecukupan dukungan teknis selama ujian berlangsung. Di samping masalah teknis, ada juga pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan akses. Beberapa pendidik dan orang tua khawatir bahwa UNBK dapat menguntungkan siswa dari daerah perkotaan atau sekolah yang lebih baik dilengkapi, meninggalkan siswa dari daerah kurang mampu di belakang. Pak Budi, seorang aktivis pendidikan, berpendapat, *"UNBK harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan semua siswa Indonesia, tidak hanya mereka yang berada di pusat kota atau di sekolah-sekolah terpilih."* Melalui berbagai tantangan yang dialami oleh pengawas, guru, dan siswa di seluruh Indonesia, jelas bahwa implementasi UNBK memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Perluasan infrastruktur teknologi, peningkatan pelatihan, dan solusi untuk memastikan keadilan harus menjadi prioritas bagi pemerintah agar bisa memastikan bahwa UNBK tidak hanya efisien tetapi juga adil dan dapat diakses oleh semua siswa Indonesia. Ini adalah kunci untuk mencapai tujuan utama dari kebijakan ini: peningkatan kualitas dan integritas penilaian pendidikan nasional (Zuhri Dwi Apriansah & Deri Wanto, 2022).

Kebijakan Merdeka Belajar

Dalam upaya untuk mengubah paradigma pendidikan di Indonesia, pemerintah meluncurkan kebijakan "Merdeka Belajar" sebagai inisiatif untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada sekolah dan universitas dalam mengelola kurikulum dan pembelajaran. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan visi untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan individu dan tantangan global masa kini. Kebijakan ini muncul dari pengakuan bahwa pendidikan di Indonesia perlu lebih dari sekedar mengikuti kurikulum yang kaku dan standar. Di era globalisasi dan perubahan teknologi yang cepat, diperlukan pendidikan yang dapat mendukung kreativitas, kemandirian, dan kemampuan adaptasi siswa. "Merdeka Belajar" merupakan jawaban atas kebutuhan tersebut, dengan memberikan keleluasaan lebih besar kepada institusi pendidikan untuk menyesuaikan metode dan isi pembelajaran dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka.

Kebijakan Merdeka Belajar memiliki beberapa tujuan kunci (Novriyanto et al., 2023):

1. Meningkatkan Kualitas Belajar: Memberikan guru kebebasan untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan siswa,

2. Fleksibilitas Kurikulum: Memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan keunikan dan kebutuhan lokal, serta minat dan bakat siswa,
3. Pemberdayaan Guru dan Siswa: Mendorong guru dan siswa untuk berkolaborasi dalam proses belajar mengajar, sehingga pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru, tetapi juga proses aktif yang melibatkan siswa.

Implementasi "Merdeka Belajar" dilakukan melalui serangkaian program dan kegiatan yang didesain untuk mengurangi birokrasi dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada guru dan kepala sekolah dalam membuat keputusan pedagogis. Salah satu langkah konkret adalah pengurangan jumlah ujian nasional sebagai syarat kelulusan, serta peningkatan penggunaan proyek dan penilaian berbasis kelas yang dirancang oleh guru. Sejak diperkenalkannya kebijakan ini, telah terjadi perubahan signifikan dalam cara guru mengajar dan siswa belajar. Sekolah-sekolah yang mengadopsi prinsip Merdeka Belajar melaporkan peningkatan motivasi belajar di kalangan siswa dan inovasi pedagogis di kalangan guru. Dengan kebijakan ini, diharapkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya mencetak lulusan yang siap kerja, tetapi juga individu yang mampu berpikir kritis, kreatif, dan mandiri (Hotimah & Rohman, 2022). Melalui narasi ini, "Merdeka Belajar" diharapkan bisa menjadi titik balik dalam pendidikan Indonesia, dimana setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, dan setiap guru memiliki kebebasan untuk memberikan pendidikan terbaik sesuai dengan kondisi dan konteks masing-masing. Kebijakan ini mengundang seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung terwujudnya pendidikan yang lebih inklusif, inovatif, dan inspiratif (Datumula, 2021).

Kebijakan Merdeka Belajar di Indonesia dirancang untuk menginspirasi inovasi dan kemandirian dalam dunia pendidikan, tetapi perjalanannya tidak bebas dari tantangan. Implementasi kebijakan ini telah menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi berbagai pihak, dari guru hingga siswa, dan memperlihatkan kompleksitas dalam reformasi pendidikan yang besar. Di sebuah SMA di Jakarta, kepala sekolah, Pak Budi, mengungkapkan kekhawatiran tentang kurangnya pedoman yang jelas dalam menerapkan kurikulum yang fleksibel. *"Meskipun ide merdeka belajar sangat kami dukung, kami sering kali bingung bagaimana seharusnya menerapkannya secara praktis tanpa panduan yang konkret,"* jelasnya. Kondisi serupa terjadi di berbagai daerah, di mana sekolah-sekolah merasa bahwa mereka diberikan kebebasan tanpa dukungan yang memadai untuk mewujudkan visi tersebut. Di Surabaya, seorang guru senior, Ibu Anita, menghadapi resistensi dari rekan-rekannya yang lebih tua, yang terbiasa dengan metode pengajaran yang lebih tradisional. *"Banyak dari kita yang merasa tidak nyaman meninggalkan cara lama karena kami tidak yakin dengan efektivitas pendekatan baru ini,"* ungkapnya. Ketidaknyamanan ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mengubah mindset dan praktek yang telah lama tertanam dalam sistem pendidikan (Karwono & Susetyo, 2021). Di daerah pedesaan di Kalimantan, masalah infrastruktur menjadi penghalang nyata. Sebuah sekolah kecil di sana berjuang dengan koneksi internet yang tidak stabil, yang sangat dibutuhkan untuk akses ke sumber pembelajaran baru dan inovatif. Kepala sekolah setempat, Pak Joko, mencatat, *"Kami ingin memanfaatkan sumber daya digital yang kini lebih dibutuhkan, namun seringkali kami terhambat oleh infrastruktur yang belum memadai."* Kembali di Bandung, pelatihan guru menjadi isu kritis lainnya. Meskipun kebijakan Merdeka Belajar mendorong penggunaan metode pengajaran yang inovatif, tidak semua guru mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengimplementasikannya. Bu Lisa, seorang guru baru, merasa tidak yakin dengan keahliannya untuk merancang materi pembelajaran yang inovatif tanpa bantuan lebih lanjut. *"Kami membutuhkan lebih banyak workshop dan pelatihan untuk benar-benar memahami cara terbaik dalam mengajar sesuai dengan kebijakan baru,"*

kata Bu Lisa. Cerita-cerita ini menunjukkan bahwa meskipun Kebijakan Merdeka Belajar memiliki niat baik untuk memodernisasi pendidikan di Indonesia, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasinya. Dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah, sekolah, dan komunitas untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki sumber daya, pelatihan, dan dukungan yang diperlukan untuk berhasil. Hanya dengan demikian, kebijakan ini dapat mencapai potensi penuhnya dalam menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar merdeka dan memberdayakan.

Kebijakan Sekolah Penggerak

Kebijakan Sekolah Penggerak adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Diumumkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, program ini bertujuan untuk menciptakan sekolah-sekolah yang bisa menjadi model inovasi pendidikan dan perbaikan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Kebijakan ini didasari oleh kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang beragam, di mana masih terdapat disparitas signifikan dalam hal akses dan kualitas pendidikan antara daerah urban dan rural, serta antara sekolah negeri dan swasta. Sekolah Penggerak diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesenjangan tersebut dan memacu sekolah lain untuk mengikuti praktik-praktik terbaik yang diterapkan (Retnaningsih, 2019).

Tujuan utama dari Kebijakan Sekolah Penggerak adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Guru dan Kepemimpinan Sekolah: Melalui pelatihan yang intensif dan berkelanjutan, guru dan kepala sekolah diharapkan dapat mengembangkan keterampilan yang lebih baik dalam mengajar serta mengelola sekolah,
2. Mengimplementasikan Kurikulum yang Inovatif: Sekolah Penggerak akan menerapkan kurikulum yang dirancang untuk lebih menekankan pada pengembangan kompetensi siswa, seperti kritis berpikir, kreatif, dan kemampuan kolaboratif,
3. Membangun Budaya Sekolah yang Positif: Inisiatif ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, di mana setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Implementasi Kebijakan Sekolah Penggerak melibatkan seleksi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia yang sudah menunjukkan potensi untuk berkembang menjadi model pendidikan yang unggul. Sekolah-sekolah ini menerima dukungan penuh dari pemerintah berupa sumber daya, pelatihan guru, dan akses ke jaringan sekolah penggerak lainnya. Selain itu, program ini juga mendorong keterlibatan aktif dari komunitas lokal untuk mendukung kegiatan sekolah. Sejak diperkenalkannya, beberapa sekolah telah menunjukkan perubahan positif, mulai dari peningkatan motivasi belajar siswa hingga inovasi dalam pengajaran yang dilakukan oleh guru. Melalui kebijakan ini, diharapkan semakin banyak sekolah di Indonesia yang terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan perubahan serupa, menciptakan efek domino dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. Melalui narasi ini, Kebijakan Sekolah Penggerak diharapkan dapat membawa angin segar dalam pendidikan Indonesia, mengubah sekolah-sekolah biasa menjadi pusat-pusat keunggulan dan inovasi, serta membantu mempersiapkan generasi muda Indonesia yang mampu bersaing di kancah global (Dewi, 2020).

Meskipun Kebijakan Sekolah Penggerak di Indonesia dimulai dengan visi yang mulia untuk mengubah wajah pendidikan di negara itu, implementasinya telah menemui beberapa permasalahan dan hambatan yang serius. Kisah-kisah dari berbagai sekolah yang terlibat dalam program ini menyoroiti kompleksitas dan tantangan yang muncul di lapangan. Di salah satu

daerah terpencil di Papua, sebuah sekolah yang terpilih menjadi Sekolah Penggerak menghadapi kesulitan logistik yang besar. *"Kami sangat bersemangat ketika terpilih, namun realitasnya, kami kesulitan mendapatkan materi dan pelatihan yang dijanjikan karena lokasi kami yang jauh,"* ungkap Pak Arman, kepala sekolah. Sumber daya yang tidak merata antara daerah urban dan rural menjadi hambatan utama, membatasi kemampuan sekolah-sekolah di daerah terpencil untuk memenuhi standar program (Ishak, 2022). Di sebuah sekolah menengah di Surabaya, transformasi menjadi Sekolah Penggerak tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Beberapa guru lebih tua menunjukkan resistensi terhadap perubahan metodologi pengajaran yang disarankan. *"Mengubah cara mengajar yang telah kami lakukan selama puluhan tahun bukanlah hal yang mudah,"* kata Ibu Sari, seorang guru senior. Resistensi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerimaan dan adaptasi terhadap inovasi, terutama di kalangan tenaga pengajar yang lebih berpengalaman. Meskipun pelatihan merupakan bagian penting dari Kebijakan Sekolah Penggerak, beberapa sekolah mengalami kesulitan dalam mengakses program pelatihan yang efektif. *"Pelatihan yang kami terima terasa terburu-buru dan tidak menyentuh detail yang kami butuhkan untuk benar-benar memahami dan mengimplementasikan kurikulum baru,"* keluh Pak Budi, seorang kepala sekolah di Bandung. Kualitas dan kedalaman pelatihan yang tidak konsisten menjadi penghambat dalam menerapkan pendekatan pembelajaran baru yang efektif (Sari & Taufina, 2020). Menjadi bagian dari program Sekolah Penggerak juga menimbulkan tekanan tambahan pada sekolah dan stafnya. *"Ada ekspektasi yang sangat tinggi untuk menunjukkan hasil yang baik segera,"* kata Bu Ani, kepala sekolah di Jakarta. Tekanan ini kadang-kadang menimbulkan stres pada guru dan siswa, dan bisa berdampak negatif pada lingkungan belajar yang seharusnya kondusif dan positif. Cerita dari berbagai daerah menggambarkan bahwa, sementara Kebijakan Sekolah Penggerak memiliki potensi besar untuk memajukan pendidikan di Indonesia, masih banyak hambatan yang perlu diatasi. Perlu ada upaya yang lebih terkoordinasi untuk memastikan bahwa semua sekolah, terutama yang berada di daerah kurang terjangkau, mendapatkan sumber daya, dukungan, dan pelatihan yang cukup. Juga, perlu ada pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran guru yang ada untuk memastikan bahwa transisi ke metode pengajaran baru dapat dilakukan dengan lancar dan efektif. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, Kebijakan Sekolah Penggerak dapat lebih dekat mencapai tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang benar-benar inklusif dan berkualitas (Madjid, 2023).

KESIMPULAN

Literature review analitik ini telah menyelidiki dan mengevaluasi berbagai kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan di Indonesia, dari Kebijakan Kurikulum 2013 hingga inisiatif terbaru seperti Kebijakan Merdeka Belajar dan Sekolah Penggerak dan kebijakan lainnya. Studi ini menyimpulkan bahwa, meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih terdapat sejumlah tantangan krusial yang perlu diatasi. Analisis menunjukkan bahwa beberapa kebijakan pendidikan menghadapi hambatan serupa, termasuk kurangnya infrastruktur yang memadai, ketidakmerataan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan dari tenaga pengajar. Pelaksanaan yang tidak konsisten dan kekurangan pelatihan yang efektif juga menjadi tema umum yang merintang keefektifan kebijakan. Review ini juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih sensitif terhadap keberagaman geografis dan sosial-ekonomi di Indonesia. Kebijakan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan beragam daerah dan populasi siswa,

memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memperoleh manfaat dari reformasi pendidikan. Melalui analisis mendalam ini, menjadi jelas bahwa meskipun tantangan yang ada adalah signifikan, peluang untuk peningkatan dan inovasi dalam sistem pendidikan Indonesia juga sangat besar. Dengan berfokus pada peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan, serta mendorong partisipasi dan dukungan yang lebih luas dari semua sektor masyarakat, Indonesia dapat memastikan bahwa sistem pendidikannya tidak hanya bertahan dalam menghadapi tantangan masa depan tetapi juga berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M., Erdayani, R., Afandi, S. A., & Rafi, M. (2022). Analisis kebijakan otonomi pendidikan di Indonesia. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 85–99. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i2.32>
- Agus Salim. (2022). Dikotomi Ilmu Perspektif Imam Ghazali Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. Kariman: *Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i1.208>
- Amri, U., Rifma, R., & Syahril, S. (2021). Konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Edukatif: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2200–2205. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/778>
- Anis Aprianti, & Siti Tiara Maulia. (2023). Kebijakan Pendidikan: Dampak Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan Bagi Guru Dan Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 181–190. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1507>
- Ariandy, M. (2019). Kebijakan Kurikulum dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia. Sukma: *Jurnal Pendidikan*, 3(2), 137–168. <https://doi.org/10.32533/03201.2019>
- Aulia, M. (2023). Eksistensi Policy Entrepreneurs dalam Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(2), 595–601. <https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4019>
- Darma, S. H., & Wulandari, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan Berkarakter di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.59818/jpi.v2i1.125>
- Datumula, S. (2021). Peraturan Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, Dan Kabinet Kerja. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 56–78. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27>
- Dewi, F. P. S. (2020). Role of Three Education Center in Strengthening Character Education Program (Ppk) At Sd Unggulan Aisyiyah Bantul. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(1), 10. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/sakp/article/viewFile/17032/16449>
- Farkhan, A., Rahmah, A., Alwatasi, U., & Setiawan, F. (2022). Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. Al Qalam: *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1921. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>
- Gusli, T., Gistituati, N., & Marsidin, S. (2021). Kebijakan Sistem Pendidikan Indonesia: Keterkaitan Dunia Sekolah dengan Dunia Kerja Sebuah Alternatif. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2539–2550. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/844>
- Hamidah, D. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44.

- Hotimah, H., & Rohman, B. (2022). Pengelolaan Dunia Pendidikan di Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Sumberdaya Manusia dan Kebijakan, Perspektif Konvensional dan Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(02), 2715–4793.
- Hubarat, B. A. (2017). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA : EVALUASI TERHADAP RUMUSAN KEBIJAKAN KURIKULUM BIDANG PENDIDIKAN TINGGI Binsar A . Hutabarat. *Societas Dei*, 4(2), 127–146. https://www.researchgate.net/publication/330849202_Kebijakan_Pendidikan_di_Indonesia_Evaluasi_terhadap_Rumusan_Kebijakan_Kurikulum_Bidang_Pendidikan_Tinggi
- Idris, I. (2020). Kajian Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Guru Dan Dosen Di Indonesia. Guru Tua : *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 41–52. <https://doi.org/10.31970/gurutua.v3i2.57>
- Ishak, D. (2021). Menciptakan Kebijakan Pendidikan Yang Lebih Baik Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 4(2), 53–59. <https://doi.org/10.54783/japp.v4i2.513>
- Ishak, D. (2022). Tinjauan Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), 30–36. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i1.497>
- Karwono, H., & Susetyo, B. (2021). PETA MUTU SATUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA (Studi Pilotting Project akreditasi 2020). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 1–10. <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i1.434>
- Khoiriyah, S., Amiruddin, A., Salik, M., & Zaini, A. (2023). Menuju Kebijakan Pendidikan Satu Atap: Kritik atas Dualisme dan Dikotomi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 13(1), 58–71. <https://doi.org/10.33367/ji.v13i1.3523>
- Kholifah, E. R., Mulyadi, M., Suryadi, S., Sutriyanti, S., & Hermanto, H. (2024). Model Perumusan Kebijakan Pendidikan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1399–1404. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3441>
- Kimbal, G., Rotty, V. N., Lengkong, J. J., & Lumapow, H. R. (2022). Kebijakan Pendidikan Ujian Akhir Nasional. *JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(2), 2021–2023. <https://doi.org/10.58258/jupe.v7i2.3482>
- Madjid, A. (2023). The Dynamics of the Education Zoning Policy in Indonesia. *JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam Interdisipiner*, 2(2), 86–94. <http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi%7C%7C ISSN2962-918786https://journal.amorfati.id/index.php/JIPSI>
- Masitoh, N. A., & Kurnia, H. (2022). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 Beserta Dampaknya. *Academy of Education Journal*, 13(1), 74–83. <https://doi.org/10.47200/aoej.v13i1.965>
- Munandar, A. imam. (2019). Kebijakan Politik Pendidikan Di Indonesia. *An-Nidhom : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 21. <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i2.4413>
- Nisak, Z. H. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Primary Education Journal (Pej)*, 2(1), 98–107. <https://doi.org/10.30631/pej.v2i1.18>
- Novriyanto, Y., Apriyana, S. B., & Komariyah, S. (2023). Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(1), 88–94. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i1.17>

- Nurkamiden, U. D. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Indonesia Era Pandemi Covid-19. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 164–169. <https://doi.org/10.30603/tjmpi.v9i2.2264>
- P. Lamadang, K., Karlina, D. A., Nuraini, R. Z., & Febriani, W. D. (2022). Isu dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 63–76. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.898>
- Prapti, K. (2021). Analisis Kebijakan Pengembangan Pendidikan (Perguruan Tinggi) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 7(1), 64–73. <https://doi.org/10.53565/pssa.v7i1.261>
- RD, A. H. (2021). Kebijakan Pendidikan Kebijakan Pendidikan Sebagai Suatu Kebijakan Publik: Suatu Analisis Terhadap Kekhususan Kebijakan Pendidikan Di Aceh. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 12(1), 103. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v12i1.499>
- Retnaningsih, H. (2019). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 161–177. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i2.1263>
- Saputri, V. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Dalam Upaya Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Smp N 1 Poncowarno. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 10(1), 99–111. <https://doi.org/10.21831/sakp.v10i1.17349>
- Sari, K. P., & Taufina. (2020). *SEJ (School Education Journal) Vol. 10* No. 1 Juni 2020. Validitas Lkpd Berbasis Rme Untuk Siswa Sekolah Dasar, 10(1), 37–42.
- Sukmurdianto, S., & Zulfa, M. Y. (2020). Kebijakan Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan: Kasus Kebijakan Politik Kolonial Belanda Dan Jepang Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Mau'izhah*, 10(2), 143. <https://doi.org/10.55936/mauizhah.v10i2.39>
- Sumpena, S., Nurhamidah, S., & Hilman, C. (2022). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan Implementasinya dalam Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 41–51. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.222>
- Suryanti, S. (2022). Implikasi Kebijakan terhadap Penilaian dalam Pendidikan Matematika di Indonesia: Tinjauan Penelitian (2011 -2020). *DIDAKTIKA: Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 28(2(1)), 120. [https://doi.org/10.30587/didaktika.v28i2\(1\).3912](https://doi.org/10.30587/didaktika.v28i2(1).3912)
- Ulum, M. (2020). Kebijakan Standar Nasional Pendidikan. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 11(1), 105–116. <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845>
- Utari, D. (2020). Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar juara kota yogyakarta implementation of inclusive education policy in the basic school juara Yogyakarta city. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(2s), 175–188.
- Yunitasari, D., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Implementasi kebijakan pendidikan dasar (definisi, aktor pelaksana, arena/konteks, jenis, dan langkah kebijakan pendidikan dasar). *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1506. <https://doi.org/10.29210/020232886>
- Zakaria, M. (2022). Dualisme Pendidikan Kegelisahan Akademik Profesi. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 20(2), 45–62. <https://doi.org/10.37216/tadib.v20i2.724>
- Zuhri Dwi Apriansah, & Deri Wanto. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Budi Pekerti Menurut Ki Hadjar Dewantara Dan Relevansi Dengan Kebijakan Pendidikan Karakter. *LITERASI: Jurnal Pendidikan Guru Indonesia*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.58218/literasi.v1i2.382>